



KETAHANAN ENERGI DITINGKATKAN DAN KETERJANGKAUAN ENERGI DIJAGA

Ketahanan energi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menciptakan keberlanjutan pembangunan sebuah negara. Konsep ketahanan energi mencakup kemampuan sebuah negara untuk menyediakan energi yang cukup, terjangkau, dan dapat diandalkan bagi seluruh masyarakatnya, serta memastikan pasokan energi yang aman dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai tantangan global, seperti perubahan iklim, fluktuasi harga energi, atau krisis energi yang tidak terduga. Kebijakan Ketahanan dan Keterjangkauan Energi 2025 yaitu (1) Mengurangi ketergantungan energi fosil dan menjadikan Indonesia sumber energi hijau dunia; (2) Skema insentif untuk mendorong temuan cadangan sumber energi baru; (3) Mendorong perbaikan tata kelola industri hulu migas; (4) Kebijakan subsidi BBM dan listrik lebih tepat sasaran dan berkeadilan; (5) Mendukung pengurangan emisi. Terkait hal tersebut terdapat beberapa kebijakan terkait ketahanan energi di Indonesia yaitu:

Pertama, Kebijakan Insentif Perpajakan Sektor Energi diberikan oleh pemerintah dalam rangka mendukung pengembangan energi terbarukan dan ramah lingkungan. Adapun kebijakan terkait insentif perpajakan sektor energi, antara lain:

1. PPN dibebaskan atas listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6600 VA, termasuk biaya penyambungan listrik dan biaya beban listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6600 VA.
2. PPh DTP Panas Bumi untuk perusahaan yang bergerak dalam energi baru terbarukan di bidang panas bumi.
3. Bea Masuk dibebaskan atas impor barang untuk kegiatan perusahaan panas bumi untuk perusahaan yang bergerak dalam energi baru terbarukan di bidang panas bumi.
4. Bea Masuk dibebaskan atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi untuk perusahaan yang melakukan impor untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
5. Pemberian Fasilitas PBB pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* untuk perusahaan yang memiliki Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

Kedua, Kebijakan Infrastruktur Energi merupakan bentuk perhatian Pemerintah dalam pemenuhan infrastruktur di bidang

energi yang dilakukan melalui antara lain belanja K/L pada Kementerian ESDM maupun pemberian pinjaman dalam rangka mendukung infrastruktur energi.

Beberapa hal terkait infrastruktur energi yang telah dilakukan melalui belanja Kementerian ESDM antara lain (1) pemberian bantuan *converter kit* kepada nelayan dan petani dengan tujuan mengalihkan dari konsumsi BBM yang lebih mahal ke LPG yang lebih murah dan bersih; (2) pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga yang tidak mampu atau berada di daerah 3T; (3) pemasangan penerangan jalan umum tenaga surya (PJU-TS) di daerah terpencil; (4) pendistribusian alat penyalur daya listrik (APDAL) yang merupakan piranti penyimpanan dan penyaluran energi listrik berbasis baterai yang dapat diisi ulang pada stasiun pengisian energi listrik untuk memberikan aliran listrik pada daerah 3T; (5) pembangunan PLTS terpusat/terpadu; (6) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH); dan (7) pembangunan transmisi pipa gas bumi ruas Semarang-Batang.

Pemberian/Penerusan Pinjaman TA 2025 digunakan untuk mendukung peralihan energi Indonesia ke energi baru dan terbarukan (EBT), serta pembiayaan inovatif bagi daerah dalam memberikan pelayanan masyarakat. Pemberian Pinjaman dilakukan sesuai dengan rencana kebutuhan penarikan pinjaman yang disampaikan Pengguna Dana dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan pekerjaan, kesiapan penarikan pinjaman, serta kesiapan pelaksana kegiatan. Pencairan Pemberian Pinjaman dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

* PT PLN (Persero), proyek:

1. Hululais Geothermal Power Plant Project (E/S)
2. Development of Pumped Storage Hydropower in the Java Bali System Project
3. Peusangan Hydroelectric Power Plant Project

* PT Pertamina (Persero), proyek: Lumut Balai Geothermal Power Plant Project

Ketiga, Kebijakan Energi Baru Terbarukan yang tentunya merupakan dukungan Pemerintah terkait dengan energi baru terbarukan melalui

Pemberian/Penerusan Pinjaman digunakan untuk mendukung peralihan energi Indonesia

ke energi baru dan terbarukan (EBT), serta pembiayaan inovatif bagi daerah dalam memberikan pelayanan masyarakat. Pemberian Pinjaman dilakukan sesuai dengan rencana kebutuhan penarikan pinjaman yang disampaikan Pengguna Dana dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan pekerjaan, kesiapan penarikan pinjaman, serta kesiapan pelaksana kegiatan. Pencairan Pemberian Pinjaman dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

* PT SMI (Persero) beserta anak perusahaan, serta Pemerintah Daerah, BUMD, maupun sektor privat selaku pengembang eksplorasi panas bumi. Proyek:

1. Leveraging Private Infrastructure Investment Project
2. Geothermal Resource Risk Mitigation
3. SDG Indonesia One-Green Finance Facility

Dukungan kepada energi baru terbarukan juga dilakukan melalui belanja K/L terutama Direktorat Jenderal EBTKE, Kementerian ESDM diantaranya dengan *feasibility study* Detail Engineering Design dan Uji Laik Operasi/Sertifikat Laik Operasi.

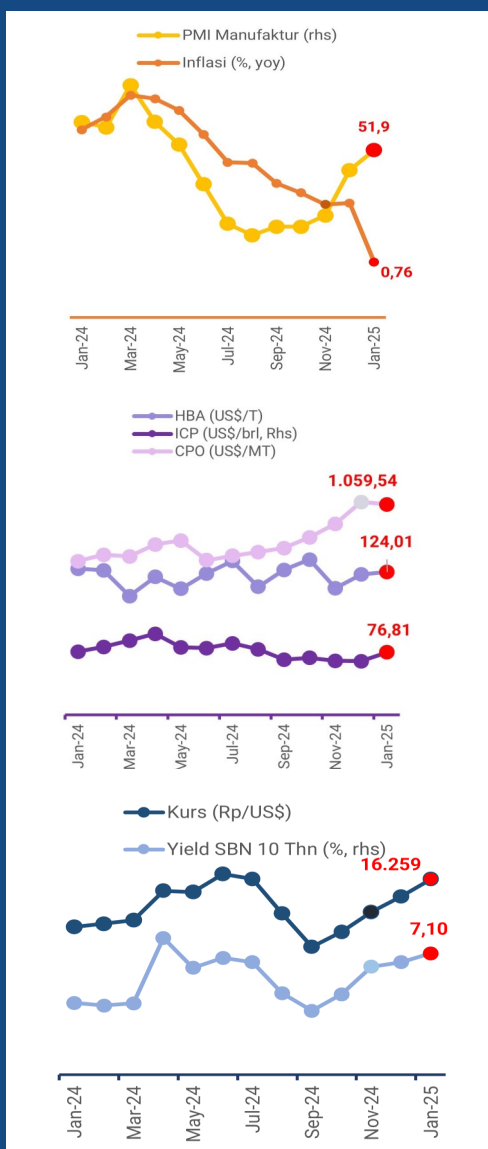
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mendukung program biodiesel dengan memberikan insentif dan pendanaan penelitian. Keempat, kebijakan subsidi dan kompensasi energi yang mendukung keterjangkauan energi sehingga sumber-sumber energi dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat serta menstabilkan harga sumber energi (BBM, listrik, LPG). Adapun kebijakannya yaitu: Melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk minyak solar dan subsidi (selisih harga) untuk minyak tanah dan LPG Tabung 3 Kg; Melanjutkan kebijakan subsidi BBM tepat sasaran; Melanjutkan upaya transformasi Subsidi LPG Tabung 3 kg menjadi lebih tepat sasaran, Subsidi Listrik diberikan kepada golongan yang berhak; Subsidi Listrik untuk rumah tangga diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan, disertai dengan penyesuaian tarif (*tariff adjustment*) untuk pelanggan non-subsidi yang diselaraskan dengan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat; Mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan.

REALISASI APBN

s.d. 31 Januari 2025

Uraian (triliun rupiah)	2024		2025			
	Real s.d. 31 Jan	Growth (%)	APBN	Real s.d. 31 Jan	% thd APBN	Growth (y-o-y, %)
A. PENDAPATAN NEGARA	219,3	(5,5)	3.005,1	157,3	5,2	(28,3)
I. Penerimaan Perpajakan	175,8	(5,7)	2.490,9	115,2	4,6	(34,5)
1. Penerimaan Pajak	152,9	(5,8)	2.189,3	88,9	4,1	(41,9)
2. Kepabeanan & Cukai	22,9	(5,0)	301,6	26,3	8,7	14,7
II. PNBP	43,5	(5,0)	513,6	42,1	8,2	(3,0)
III. Penerimaan Hibah	0,1	1.046,5	0,6	0,0	1,7	(80,9)
B. BELANJA NEGARA	184,2	30,2	3.621,3	180,8	5,0	(1,9)
I. Belanja Pemerintah Pusat	96,4	15,8	2.701,4	86,0	3,2	(10,7)
1. Belanja K/L	44,8	56,0	1.160,1	24,4	2,1	(45,5)
2. Belanja Non-K/L	51,6	(5,3)	1.541,4	61,7	4,0	19,4
II. Transfer Ke Daerah	87,8	50,9	919,9	94,7	10,3	7,9
C. KESEIMBANGAN PRIMER	65,3	(42,7)	(63,3)	10,6	(16,8)	(83,7)
D. SURPLUS/ (DEFISIT)	35,1	(61,3)	(616,2)	(23,5)	3,8	(166,8)
% thd PDB	0,16		(2,53)	(0,10)		
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	107,3	10,9	616,2	154,0	25,0	43,6
SiLPA/(SiKPA)	142,4		-	130,6		

LEADING INDICATORS YANG BERPENGARUH TERHADAP POSTUR APBN



Sektor Riil

Pada Januari 2025, inflasi tahunan Indonesia mencapai 0,76% (yoy). Inflasi tersebut terendah sejak tahun 2000 yang terutama didorong oleh kebijakan tarif diskon listrik sebesar 50% dan penurunan tarif angkutan udara. Sementara itu, PMI Manufaktur Januari meningkat ke level 51,9, menandakan ekspansi sektor manufaktur setelah mengalami kontraksi dalam beberapa bulan sebelumnya yang didorong oleh peningkatan produksi dan permintaan baru, baik dari pasar domestik maupun ekspor.

Sektor Eksternal

Harga komoditas utama mengalami tren kenaikan. Harga Batubara Acuan (HBA) kembali meningkat hingga US\$124,01/ton, didorong oleh permintaan kuat dari China dan India serta pembatasan produksi di negara produsen utama. Harga minyak sawit mentah (CPO) juga meningkat mencapai US\$1.059,54/MT akibat permintaan global yang tinggi efek dari kebijakan transisi energi di berbagai negara meningkatkan permintaan biodiesel berbasis CPO sebagai alternatif bahan bakar fosil. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia (ICP) naik menjadi US\$76,81/barel, dipicu oleh pembatasan produksi OPEC+, meningkatnya konsumsi energi global, serta gangguan rantai pasok akibat cuaca ekstrem di beberapa wilayah produsen.

Sektor Keuangan

Sektor Keuangan domestik kembali mengalami tekanan dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga Rp16.259/US\$ dan kenaikan yield SBN 10 tahun mencapai 7,10%. Kondisi ini dipicu oleh *capital outflow* akibat keputusan The Fed untuk mempertahankan tingkat suku bunga di AS. Hal ini juga berdampak terhadap tingkat suku bunga domestik termasuk SBN 10 tahun yang cenderung meningkat. Tingginya suku bunga di AS juga turut juga menyebabkan terjadi *capital outflow* yang menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

PENDAPATAN NEGARA

KINERJA PENDAPATAN NEGARA AWAL TAHUN MENCAPAI 5,2 PERSEN DARI TARGET APBN 2025

Realisasi pendapatan negara awal tahun 2025 mencapai Rp157,3 triliun (5,2% terhadap APBN 2025). Capaian tersebut berkontraksi baik dari sisi perpajakan maupun PNBP.

Penerimaan Perpajakan Mengalami Tekanan Cukup Dalam

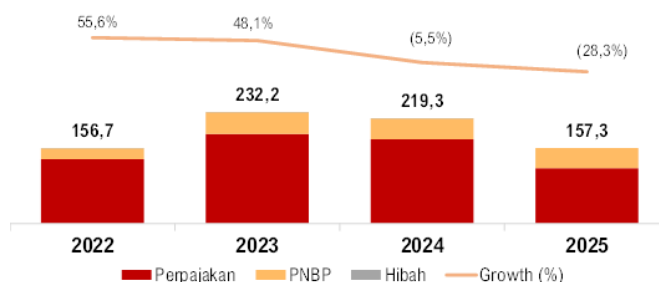
Dari sisi penerimaan perpajakan, kinerja penerimaan pajak sampai dengan Januari tahun 2025 mencapai Rp115,2 triliun atau berkontraksi 34,5% (yoy). Penerimaan Pajak berkontraksi 41,9% yang disebabkan oleh pergeseran pembayaran PPh 21 dampak implementasi tarif efektif rata-rata (TER), dinamisasi PPh Badan terutama sektor industri minyak kelapa sawit dan industri pupuk, serta kenaikan restitusi dari permohonan pengembalian pendahuluan dari akumulasi kompensasi lebih bayar selama 3 tahun.

Sementara itu, kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai mampu tumbuh 14,7%. Kinerja tersebut dipengaruhi oleh (1) kenaikan tarif efektif CHT dan pelunasan maju, (2) kenaikan penerimaan bea masuk dari komoditas utama dan penguatan kurs dolar Amerika Serikat; (3) tingginya harga CPO dan biji kakao meskipun volumenya mengalami penurunan.

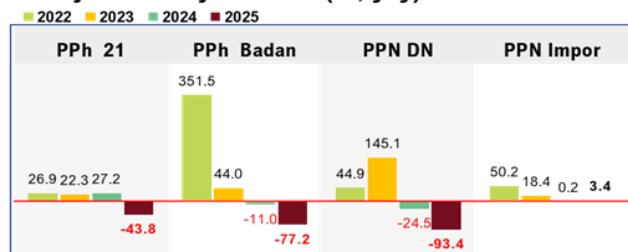
Kinerja perpajakan secara detail dapat dilihat pada dashboard:

<https://bit.ly/DashboardPerpajakanLentera2025>

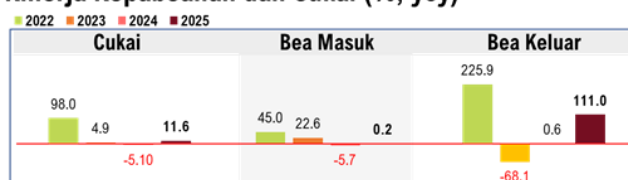
Pendapatan Negara (Rp T)



Kinerja Jenis Pajak Utama (% , yoy)



Kinerja Kepabeanan dan Cukai (% , yoy)



KINERJA PNBP S.D. 31 JANUARI 2025 MASIH MENGHADAPI TEKANAN PADA PENDAPATAN SDA DAN PNBP LAYANAN K/L

Realisasi PNBP sampai dengan 31 Januari 2025 mencapai Rp42,1 triliun (8,2% dari APBN 2025), berkontraksi 3,1% (yoy). Perlambatan ini utamanya disebabkan oleh penurunan pada Pendapatan SDA, PNBP Lainnya, dan Pendapatan BLU meskipun Pendapatan KND mengalami peningkatan 60,7% (yoy).

Realisasi Pendapatan SDA Migas mencapai Rp8,4 triliun (6,9% dari APBN 2025), berkontraksi 12,2% (yoy). Perlambatan ini terutama disebabkan oleh penurunan proforma *lifting* yang terealisasi di bulan Desember 2024 akibat penurunan tingkat alamiah sumur migas yang tinggi sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua, serta peningkatan *cost recovery* untuk bulan Desember 2024 yang meningkat 4% dibandingkan bulan Desember 2023. Pada periode

Januari-Desember 2024, rata-rata *lifting* minyak bumi sebesar 579,7 ribu barel/hari (2023: 599,4 ribu barel/hari) dan rata-rata *lifting* gas bumi mencapai sebesar 981,7 ribu barel/hari (2023: 999,8 ribu barel/hari). Selanjutnya, rata-rata ICP periode Januari 2025 juga mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar US\$76,81/barel (2024: US\$77,12/barel).

Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas mencapai Rp8,6 triliun (8,9% dari APBN 2025), berkontraksi 8,6% (yoy). Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh realisasi Pendapatan SDA Pertambangan Minerba yang berkontraksi 8,8% (yoy) akibat penurunan kinerja penerimaan royalti batubara dampak termoderasinya HBA dan penurunan produksi batubara. Realisasi Pendapatan SDA Kehutanan juga mengalami kontraksi 7,6% (yoy) yang disebabkan oleh

penurunan pembayaran Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dampak penurunan harga kayu bulat. Realisasi Pendapatan SDA Kelautan dan Perikanan juga mengalami perlambatan sebesar 7,1% (yoy) disebabkan menurunnya Pendapatan Hasil perikanan. Sementara itu, realisasi Pendapatan SDA panas bumi tumbuh 17,1% (yoy) utamanya disumbang oleh pembayaran kewajiban iuran tetap panas bumi tahun 2025 oleh PT PLN.

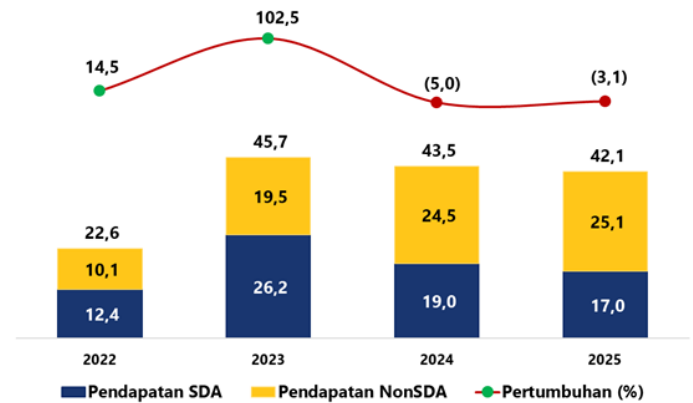
Realisasi Pendapatan KND mencapai Rp10,9 triliun (12,1% dari APBN 2025), tumbuh 60,7% (yoy). Realisasi tersebut berasal dari pembayaran dividen Perbankan, yaitu Dividen Interim BRI Tahun Buku 2024. Pembayaran dividen interim BRI ini mengalami peningkatan sebesar 60,7% jika dibandingkan dengan

pembayaran dividen interim BRI Tahun Buku 2023 sebesar Rp6,77 triliun.

Realisasi PNBPN Lainnya mencapai Rp13,0 triliun (10,2% dari APBN 2025), berkontraksi 18,8% (yoy). Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh PNBPN K/L dari Premium Obligasi yang turun 98,28%, yakni sebesar Rp11,0 milyar (2024: Rp935,2 milyar), dan Pendapatan Penjualan Hasil Tambang yang berkontraksi sebesar 12,3% (yoy) akibat moderasi HBA. Sementara itu, Pendapatan *Domestic Market Obligation* (DMO) belum terealisasi di bulan Januari 2025, sama seperti bulan Januari pada tahun sebelumnya.

Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) mencapai Rp1,2 triliun (1,6% dari APBN 2025), berkontraksi 26,8% (yoy). Perlambatan ini utamanya dipengaruhi oleh penurunan Pendapatan BLU Nonsawit, terutama dari pendapatan pendidikan yang turun sebesar 51,1% dan pendapatan jasa layanan RS turun sebesar 21,5%. Sementara itu, Pendapatan BLU Sawit belum mencatatkan realisasi yang disebabkan oleh belum adanya pengesahan BLU sawit pada bulan Januari 2025. Capaian ini diperkirakan akan jauh meningkat setelah pengesahan di triwulan I 2025.

Realisasi PNBPN s.d 31 Januari, 2022-2025
(triliun rupiah)



HIBAH

Penerimaan hibah mencapai Rp0,01 triliun, dipengaruhi terutama oleh penerimaan hibah luar negeri. Hibah tersebut berasal dari skema terencana multilateral.

BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja Negara sampai dengan Januari Tahun 2025 mencapai Rp180,8 T (5,0% dari APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 T) atau berkontraksi 1,9% dibandingkan realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp184,2 triliun (5,5% dari APBN 2024). Realisasi Belanja Negara tersebut terdiri atas realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp86,0 T (3,2% dari APBN 2025) dan Transfer ke Daerah sebesar Rp94,7 T (10,3% dari APBN 2025).

BPP DIMANFAATKAN ANTARA LAIN UNTUK PEMBAYARAN PBI JKN, MAKAN BERGIZI GRATIS, PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMERINTAH, DAN PEMBAYARAN GAJI ASN/TNI/POLRI

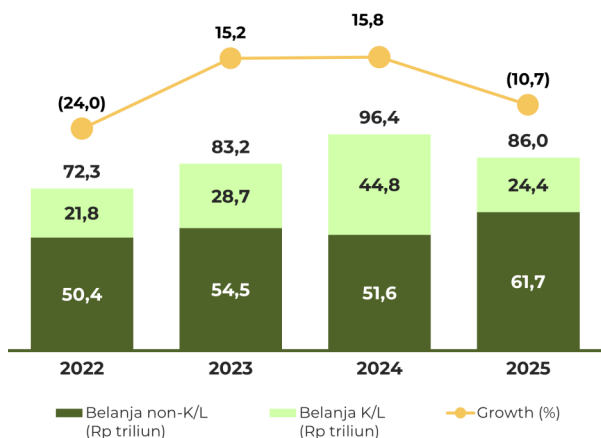
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp86,0 T tersebut terdiri dari realisasi Belanja K/L dan Belanja Non-K/L. Realisasi Belanja K/L mencapai Rp24,4 T (2,1% dari APBN 2025) atau berkontraksi 45,5% dibandingkan dengan Realisasi APBN sampai dengan 31 Januari 2024 yang mencapai Rp44,8 T (4,1% dari APBN 2024). Belanja K/L tersebut dimanfaatkan antara lain untuk penyaluran berbagai program bantuan sosial, bantuan iuran PBI JKN, bantuan penyaluran PIP, sarana konektivitas transportasi darat, laut, dan udara, prasarana pendidikan dasar dan menengah, pengadaan sarana dan prasarana bidang hankam, serta pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri. Selanjutnya, Realisasi Belanja Non-K/L mencapai Rp61,7 T (4,0% dari APBN 2025) atau tumbuh 19,4% dibandingkan dengan realisasi APBN sampai dengan 31 Januari 2024 yang mencapai Rp51,6 T (3,8% dari APBN 2024). Belanja Non-K/L tersebut dimanfaatkan antara lain untuk pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang, dan penyaluran subsidi.

Adapun penjelasan kinerja Belanja K/L Tahun 2024 berdasarkan jenis belanja dapat disampaikan sebagai berikut.

Realisasi Belanja Pegawai K/L mencapai Rp16,9 T (5,5% dari APBN 2025) atau tumbuh 10,5% dibandingkan dengan realisasi bulan Januari tahun 2024 yang mencapai Rp15,3 T (5,3% dari APBN 2024). Realisasi Belanja Pegawai tersebut terdiri atas komponen gaji dan tunjangan sebesar Rp11,3 T dan komponen tunjangan kinerja, honorarium, lembur, dan lainnya sebesar Rp5,6 T. Realisasi tersebut dipengaruhi antara lain pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) di Kemenag.

Realisasi Belanja Barang K/L mencapai Rp3,2 T (0,7% dari APBN 2025) atau berkontraksi yang cukup besar yaitu 75,1% dibandingkan dengan realisasi bulan Januari tahun 2024 yang mencapai Rp12,9 T (3,2% dari APBN 2024). Penurunan belanja barang antara lain disebabkan oleh penyaluran BOS dan persiapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 yang cukup besar. Secara rinci realisasi Belanja Barang dimanfaatkan antara lain untuk: (1) modernisasi almatsus dan sarpras Polri; (2) penggunaan kekuatan Kemenhan; (3) pelayanan kesehatan UPT Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes; (4) komunikasi publik anggota Legislatif; (5) pemeliharaan keamanan & ketertiban masyarakat; (6) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; dan (7) penyediaan dan penyaluran makan bergizi.

**Realisasi BPP s.d. 31 Januari 2022–2025
(triliun rupiah)**



Realisasi Belanja Modal mencapai Rp172,6 M (0,1% dari pagu APBN 2025) atau terkontraksi 95,8% dibandingkan dengan realisasi Januari 2024 yang mencapai Rp4,1 T (1,7% dari APBN 2024), yang dipengaruhi antara lain oleh penundaan kontrak dari proyek infrastruktur serta pengadaan peralatan dan mesin. Kinerja realisasi Belanja Modal dimanfaatkan antara lain untuk: (1) pengadaan sarpras non alutsista TNI dan peningkatan rumah dinas matra udara oleh Kementerian Pertahanan; (2) sarana konektivitas transportasi darat, laut, dan udara oleh Kementerian Perhubungan; serta (3) prasarana pendidikan dasar dan menengah oleh Kementerian Agama.

Realisasi Bantuan Sosial K/L mencapai Rp4,1 triliun (3,1% dari pagu APBN 2025) atau terkontraksi 66,8% (yoy) yang utamanya dipengaruhi oleh belum disalurkannya bantuan PKH dan Kartu Sembako triwulan I 2025. Sampai dengan akhir Januari 2025, realisasi belanja Bansos antara lain dimanfaatkan untuk: (1) penyaluran bantuan iuran bagi 96,7 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (2) penyaluran bantuan KIP Kuliah melalui Kemenag; (3) pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) serta bantuan permakanan bagi yatim piatu, lansia dan penyandang disabilitas.

Realisasi Belanja Non-K/L Tahun 2024 terutama dipengaruhi oleh pembayaran bunga utang, pembayaran manfaat pensiun, serta penyaluran subsidi. Pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp23,5 T (13,6% dari APBN 2025) atau tumbuh 15,7% dibandingkan dengan realisasi bulan Januari 2024 yang mencapai Rp20,3 T (12,5% dari APBN 2024). Realisasi pembayaran bunga utang sebesar Rp34,1 T (6,2% dari APBN 2024) atau tumbuh 13,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 yang mencapai Rp30,1 T (6,1% dari APBN 2023). Kemudian, realisasi Belanja Subsidi mencapai Rp2,9 T (0,9% dari APBN 2025) atau lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi bulan Januari 2024 yang mencapai Rp0,2 M. Realisasi Belanja Subsidi terdiri atas: (1) Subsidi Energi sebesar Rp2,9 T, untuk pembayaran kurang bayar

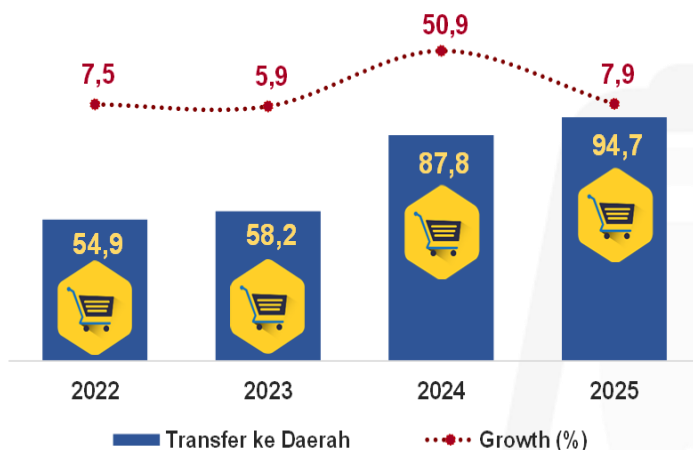
subsidi energi; dan (2) Subsidi Non-Energi sebesar Rp53,1 M, dengan manfaat penyaluran untuk Subsidi Bunga KUR kepada 156 ribu debitur dan plafon penyaluran KUR sebesar Rp7,1 T, serta penyaluran pupuk bersubsidi sebesar 631 ribu ton. Realisasi Belanja Lain-Lain mencapai Rp94,5 M (0,0% dari APBN 2025) atau terkontraksi sebesar 46,8% dibandingkan dengan APBN 2024 yang sebesar Rp177,5 M, antara lain dimanfaatkan untuk bantuan kemasyarakatan presiden.

REALISASI TRANSFER KE DAERAH (TKD) S.D. 31 JANUARI 2025 UTAMANYA UNTUK Mendukung pelaksanaan layanan publik di daerah, antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan

Pada tahun 2025 alokasi anggaran Transfer ke Daerah diarahkan untuk: (1) meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan; (2) meningkatkan peran TKD dan memperkuat kemampuan keuangan daerah guna mendorong peningkatan belanja produktif melalui penguatan sinergi dengan pembiayaan inovatif, penguatan *local taxing power*, serta penguatan *well-being* melalui pencapaian SPM dan prioritas nasional; (3) mendorong pengembangan sumber ekonomi baru di daerah melalui penguatan kerja sama antardaerah, peningkatan investasi daerah, dan keterlibatan dalam *global supply chain*; dan (4) memperbaiki mekanisme penyaluran TKD guna menjaga kondisi fiskal pemerintah daerah.

Sampai dengan 31 Januari 2025 realisasi penyaluran TKD mencapai Rp94,7 T (10,3% terhadap APBN 2025), menunjukkan peningkatan sebesar 7,9% (yoy) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2024. Hal ini terutama dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah dan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik dalam memenuhi persyaratan penyaluran TKD.

**Realisasi Penyaluran TKD s.d. 31 Januari, 2022-2025
(triliun rupiah)**



Penyaluran DBH s.d. 31 Januari 2025 telah terealisasi sebesar Rp8,2 T (4,3% terhadap APBN 2025). Realisasi DBH s.d. 31 Januari 2025 seluruhnya berasal dari DBH SDA, sedangkan DBH Pajak dan DBH Perkebunan Sawit belum terdapat realisasi. Selanjutnya, Penggunaan DBH di tahun 2025 antara lain diarahkan untuk mendukung kebijakan DBH *earmarked* bagi sektor-sektor prioritas yang didesain lebih luas dan fleksibel sesuai peraturan perundang-undangan.

Realisasi penyaluran DAU s.d. 31 Januari 2025 mencapai Rp57,8 T (12,9% terhadap APBN 2025), lebih tinggi sebesar 28,0% (yoy) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2024. Realisasi tersebut seluruhnya berasal dari penyaluran DAU *Block Grant* yang utamanya digunakan untuk pembayaran gaji ASN Daerah, sedangkan penyaluran DAU *Specific Grant* berupa dukungan DAU untuk bidang pendidikan, kesehatan, pendanaan kelurahan, dan penggajian formasi PPPK tahun 2025 belum terdapat realisasi.

Realisasi penyaluran DAK s.d. 31 Januari 2025 sebesar Rp27,8 T (15,0% terhadap APBN 2025), lebih tinggi 0,9% (yoy) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2024. Realisasi tersebut seluruhnya berasal dari penyaluran DAK Nonfisik (Dana BOS sebesar Rp25,2 T, Dana BOP PAUD sebesar Rp1,8 T, dan Dana BOP Kesetaraan sebesar Rp0,8 T), sedangkan DAK Fisik dan Hibah kepada Daerah belum terdapat realisasi.

Dana Otsus Aceh dan Provinsi-provinsi di wilayah Papua tahun 2025 diarahkan untuk penurunan kemiskinan, perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, serta mendukung capaian rencana induk percepatan pembangunan Papua untuk mewujudkan

Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif. Selanjutnya, sama dengan periode tahun sebelumnya, sampai dengan 31 Januari 2025 belum terdapat realisasi penyaluran Otsus Aceh dan Otsus Provinsi-provinsi di wilayah Papua.

Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta pada tahun 2025 diarahkan untuk: (1) penurunan tingkat kemiskinan; (2) pemberdayaan masyarakat dan UMKM; dan (3) peningkatan penyediaan layanan dasar publik daerah. Selanjutnya, sama dengan periode tahun sebelumnya, sampai dengan 31 Januari 2025 belum terdapat realisasi penyaluran Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta.

Dana Desa pada tahun 2025 difokuskan antara lain untuk: (1) penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa paling tinggi sebesar 15% dari pagu yang diterima setiap desa; (2) penyediaan layanan dasar kesehatan desa termasuk *stunting*; (3) dukungan program ketahanan pangan; dan (4) operasional pemerintah desa paling tinggi sebesar 3% dari pagu yang diterima setiap desa. Realisasi penyaluran Dana Desa s.d. 31 Januari 2025 mencapai Rp1,0 T (1,4% terhadap APBN 2025). Realisasi Dana Desa tersebut termasuk penyaluran BLT Desa sebesar Rp7,4 T yang ditujukan bagi sekitar 24,8 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

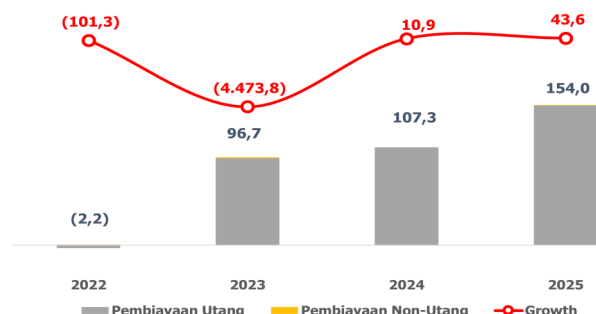
Selanjutnya, Pemerintah mengalokasikan Dana Insentif Fiskal kepada daerah dengan tujuan untuk mendorong kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola APBD dan meningkatkan kemandirian daerah. Sama dengan periode tahun sebelumnya, s.d. 31 Januari 2025 belum terdapat realisasi penyaluran Dana Insentif Fiskal.

PEMBIAYAAN

Pembiayaan anggaran sampai dengan Bulan Januari 2025 terealisasi sebesar Rp154,04 T atau 25,00% dari APBN 2025. Realisasi ini mengalami kenaikan (*growth*) sebesar 43,57% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Kenaikan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh adanya kenaikan dalam realisasi pembiayaan utang.

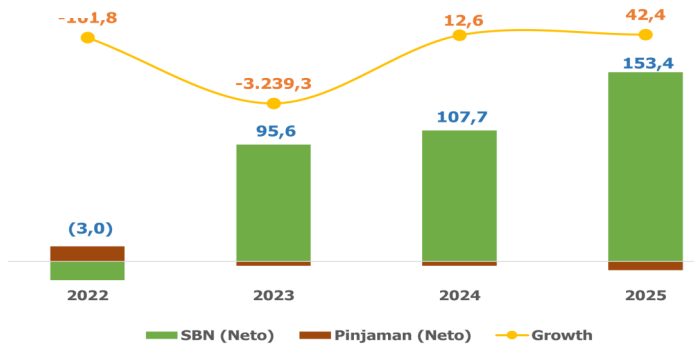
Pembiayaan utang sampai dengan Bulan Januari 2025 secara neto terealisasi sebesar Rp153,36 T. Realisasi pembiayaan utang tersebut naik 42,42% (yoy) yang terdiri dari realisasi penerbitan SBN (neto) sebesar Rp160,87 T dan realisasi pinjaman (neto) sebesar negatif Rp7,52 T pada Bulan Januari 2025.

Realisasi Pembiayaan Anggaran s.d 31 Januari, 2022-2025 (triliun Rupiah)



Selanjutnya, realisasi pinjaman (neto) sebesar negatif Rp7,52 T terdiri dari Pinjaman Dalam Negeri/PDN (neto) yang terealisasi sebesar negatif Rp0,03 T yang berasal dari pembayaran cicilan pokok PDN dan Pinjaman Luar Negeri/PLN (neto) yang terealisasi sebesar negatif

Realisasi Pembiayaan Utang s.d 31 Januari, 2022-2025 (triliun Rupiah)



Rp7,49 T yang berasal dari penarikan PLN (bruto) Rp0,04 T dan pembayaran cicilan pokok PLN sebesar negatif Rp7,52 T.

Sementara itu, dari pos Pembiayaan Non-Utang yang terealisasi sebesar Rp0,68 T sampai dengan Januari 2025, terdiri dari realisasi pembiayaan investasi sebesar Rp0,49 T. Keseluruhan realisasi pembiayaan investasi tersebut berasal dari sisi penerimaan, yaitu penerimaan kembali investasi yang berasal dari penerimaan pengembalian pokok pinjaman PEN daerah.

Sampai dengan Bulan Januari 2025, pemberian pinjaman telah terealisasi (neto) sebesar Rp85,90 M. Realisasi tersebut berasal dari realisasi penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman kepada BUMN/Pemda

sebesar Rp1,76 M dan penerimaan cicilan pengembalian dana antisipasi untuk pembayaran kepada masyarakat terdampak Lumpur Sidoarjo sebesar Rp84,14 M.

Selanjutnya, pos pembiayaan lainnya telah terealisasi sebesar Rp0,1 T yang berasal dari Hasil Pengelolaan Aset (HPA). HPA merupakan sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari Penerimaan Hasil Penjualan/ Penyelesaian Aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Penerimaan Hasil Penjualan/ Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL).

Realisasi Pembiayaan Non-Utang s.d 31 Januari, 2022-2025 (triliun Rupiah)

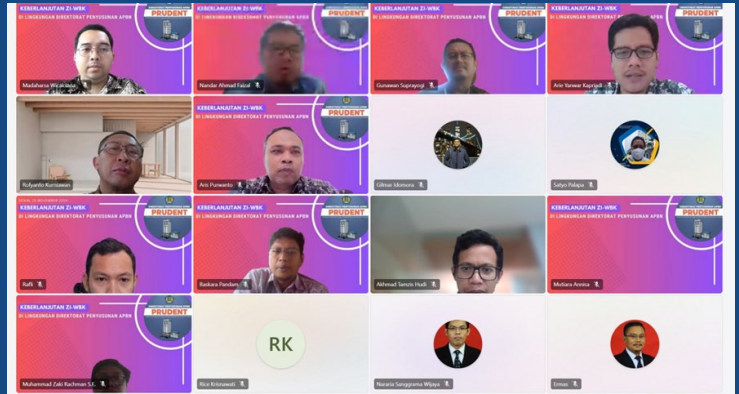


EVENT APBN

DIREKTORAT PENYUSUNAN APBN CANANGKAN KEBERLANJUTAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2024-2025

Penyelenggara	:	DJA
Waktu dan Tempat	:	21 Januari 2025, Media Online Ms Teams 31 Januari 2025. Hybrid
Peserta	:	Para Pegawai Direktorat Penyusunan APBN serta Bagian Kepatuhan Internal, Manajemen Risiko, dan Advokasi

Keberlanjutan ZI WBK menjadi salah satu komitmen nyata dari Direktorat Jenderal Anggaran khususnya Direktorat Penyusunan APBN dalam sosialisasi, internalisasi, dan implementasi nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Program Budaya Organisasi di lingkungan Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berkenaan implementasi tersebut, telah dilakukan dua kali sosialisasi dan internalisasi yang dihadiri oleh Para Pegawai Direktorat Penyusunan APBN serta Bagian Kepatuhan Internal, Manajemen Risiko, dan Advokasi.



Pertemuan tanggal 21 Januari 2025 membahas monitoring kinerja atas kelompok kerja (1) Pertemuan tanggal 31 Januari 2025, membahas kondisi dan progress Pemenuhan Syarat untuk Keberlanjutan ZI-WBK di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN sampai dengan akhir bulan Januari 2025. Direktur Penyusunan APBN menegaskan bahwa proses menuju keberlanjutan ZI-WBK di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN perlu dilandasi sinergi yang kuat antar masing-masing Pokja untuk mendukung kelengkapan dokumen administrasi ataupun kelengkapan lainnya. Sementara itu, Perwakilan dari bagian KIMRA, Sekretariat DJA menyampaikan Pengisian Lembar Kinerja Evaluasi diperlukan menggunakan dokumen terkini dan melakukan peningkatan dalam aspek-aspek lain (2) Penandatanganan Maklumat Pelayanan Direktorat Penyusunan APBN sebagai bentuk komitmen pemberian layanan .



EVENT APBN

PERWAKILAN PEMERINTAH KAMBOJA *STUDY VISIT* SISTEM PENGANGGARAN DI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Penyelenggara	:	DJA
Waktu dan Tempat	:	10-11 Februari 2025, Lantai 4 Direktorat Jenderal Anggaran
Peserta	:	Para pegawai Ministry of Economy and Finance, Cambodia
Narasumber/Petugas	:	Perwakilan DJA (Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Sistem Penganggaran, Sekretariat DJA) serta Perwakilan Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Para pegawai Ministry of Economy and Finance, Cambodia melakukan *study visit* dalam pengembangan terkait penganggaran pada tanggal 10 sampai dengan 11 Februari 2025. Pada tanggal 10 Februari 2025, dalam sesi pertama, perwakilan dari Direktorat Sistem Penganggaran, DJA membahas sejarah reformasi pengelolaan keuangan publik di Indonesia, kerangka konseptual sistem penganggaran di Indonesia, penerapan modul persiapan anggaran. Dalam sesi kedua Perwakilan Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan menjelaskan praktik proses penganggaran di Kementerian Keuangan Indonesia meliputi empat tahap: Baseline (Jan-Mar), pagu indikatif (Apr-Jun), pagu anggaran (Jul-Sep), dan pagu alokasi (Okt-Nov). Seluruh proses mengikuti kebijakan efisiensi anggaran dan dievaluasi oleh Biro Perencanaan, Keuangan, dan Inspektorat Jenderal untuk memastikan kepatuhan regulasi. Selanjutnya pada hari berikutnya dilakukan pembahasan secara tematik.



BERKOLABORASI DENGAN BPPK, DJA MENGADAKAN PELATIHAN DASHBOARD DINAMIS INTERAKTIF DI *IN-HOUSE*

Penyelenggara	:	DJA dan BPPK
Waktu dan Tempat	:	3-7 Februari dan 13 Februari 2025, Lantai 20 Direktorat Jenderal Anggaran
Peserta	:	Para Pegawai Direktorat Penyusunan APBN dan Sekretariat DJA
Narasumber/Petugas	:	Agus Hekso Pramudijono (Pusdiklat Keuangan Umum), Fakhrudin (Pusdiklat Keuangan Umum), Ninin Sapto Hargiyanto (Pusdiklat Keuangan Umum), dan Moch. Ihsan, S.KOM (Tenaga Ahli IT Profesional)

Workshop Pembuatan *Dashboard* Dinamis Interaktif dengan *Microsoft Excel* Tahun 2025 untuk kebutuhan internal pegawai Direktorat Jenderal Anggaran terutama Direktorat Penyusunan APBN dan Sekretariat DJA. Pelatihan ini dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh Agus Hekso Pramudijono (Widyaiswara Madya Pusdiklat Keuangan Umum). Hari pertama dimulai dengan dasar-dasar *Microsoft Excel* dan teknik data *cleaning*. Hari kedua fokus pada *Pivot Table*, *Pivot Chart*, serta visualisasi data menggunakan fitur dinamis dan interaktif seperti *Slicer* dan *Timeline*. Hari ketiga melibatkan pembuatan *draft* visualisasi dan diskusi desain *dashboard*. Hari keempat mengajarkan *Power Query* untuk impor dan transformasi data, *cleaning data* kompleks serta penggunaan DAX untuk visualisasi dinamis. Hari kelima berfokus pada desain *template dashboard* dan optimasi performa. Pada hari terakhir, peserta menyempurnakan *dashboard* mereka, melakukan presentasi, serta menerima umpan balik. *Workshop* ini memberikan keterampilan praktis dalam membuat *dashboard* interaktif dengan *Microsoft Excel*, memperkenalkan berbagai teknik untuk meningkatkan visualisasi data, serta mempersiapkan peserta untuk mempresentasikan hasilnya dengan efektif dan profesional.



REDAKSI

Direktorat Penyusunan APBN

Gedung Sutikno Slamet

Jl. DR Wahidin No. 1

Jakarta Pusat

Telp: (021) 3849315

Email: penyusunan.apbn@gmail.com

Ditandatangani secara elektronik

PRUDENT

Profesional, Responsif, Unggul, Dedikatif, Efisien, No Korupsi, Transparan